

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh langsung kinerja keuangan daerah berdasarkan variabel rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio belanja modal terhadap kemiskinan maupun pengaruh tidak langsung dengan dimediasi oleh pertumbuhan ekonomi pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat di tarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kinerja keuangan daerah yang ukur dengan rasio kemandirian secara langsung berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, semakin meningkat kemandirian daerah dalam mengelola pemerintahannya maka akan terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan karena adanya kesenjangan pendapatan antar daerah dan masih rendahnya tingkat kemandirian di sebagian besar daerah.
2. Kinerja keuangan daerah yang diukur dengan rasio efektivitas secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, semakin meningkat efektivitas daerah dalam mengelola anggaran di daerah tersebut maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan karena tingginya tingkat efektivitas PAD di sebagian besar daerah yang

berarti program yang ditargetkan berhasil dilakukan dan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi.

3. Kinerja keuangan daerah yang diukur dengan rasio belanja modal secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, semakin meningkat alokasi belanja daerah untuk pembangunan infrastruktur pelayanan publik maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan karena belanja modal dapat meningkatkan produktivitas dan menambah pendapatan masyarakat sehingga terjadi pertumbuhan ekonomi.
4. Pertumbuhan ekonomi secara langsung berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Hasil ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi mampu mempengaruhi tingkat kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, semakin meningkat pertumbuhan ekonomi maka akan menurunkan tingkat kemiskinan. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah yang bersifat *pro poor growth* akan mengurangi tingkat pengangguran yang pada akhirnya menurunkan angka kemiskinan
5. Kinerja keuangan daerah yang diukur dengan rasio kemandirian secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, semakin meningkat kemandirian untuk melakukan seluruh aktivitas pemerintah di daerah tersebut maka akan meningkatkan kemiskinan. Hal ini disebabkan karena adanya ketimpangan pendapatan antar daerah dan masih rendahnya tingkat kemandirian di sebagian besar daerah.

6. Kinerja keuangan daerah yang diukur dengan rasio efektivitas secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, semakin meningkat efektivitas daerah dalam mengelola anggaran di daerah tersebut maka akan meningkatkan kemiskinan. Hal ini disebabkan karena belanja penanggulangan kemiskinan kurang tepat sasaran dan distribusi penerima manfaat bantuan sosial belum ideal.
7. Kinerja keuangan daerah yang diukur dengan rasio belanja modal secara langsung berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, semakin meningkat belanja modal maka akan meningkatkan kemiskinan. Hal ini disebabkan karena belanja modal di beberapa daerah belum terserap menyeluruh dan alokasi belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah tidak difokuskan secara langsung untuk pengentasan kemiskinan.
8. Kinerja keuangan daerah yang diukur dengan rasio kemandirian secara tidak langsung berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi. Hasil ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mampu memediasi antara pengaruh rasio kemandirian terhadap kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dengan. Rasio kemandirian tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan tidak dapat memberikan dampak terhadap penurunan kemiskinan.
9. Kinerja keuangan daerah yang diukur dengan rasio efektivitas secara tidak langsung berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan melalui

pertumbuhan ekonomi. Hasil ini menunjukkan bahwa rasio efektivitas mampu mempengaruhi kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dengan dimediasi oleh pertumbuhan ekonomi, semakin meningkat efektivitas daerah dalam mengelola anggaran di daerah tersebut maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang otomatis berdampak pada penurunan kemiskinan.

10. Kinerja keuangan daerah yang diukur dengan rasio belanja modal secara tidak langsung berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi. Hasil ini menunjukkan bahwa rasio belanja modal mampu mempengaruhi kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dengan dimediasi oleh pertumbuhan ekonomi, semakin meningkat alokasi belanja daerah untuk pembangunan infrastruktur pelayanan publik maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang otomatis berdampak pada penurunan kemiskinan.

## **5.2. Saran**

Berdasarkan temuan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat beberapa saran yang dapat peneliti ajukan, sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah disarankan untuk lebih memperhatikan pengelolaan keuangan daerah karena dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Pemerintah sebaiknya mengelola keuangan daerah dengan memperhatikan konsep *value for money* dan menargetkan untuk program/kegiatan yang memberikan dampak baik bagi masyarakat. Pemerintah daerah diharapkan untuk mengembangkan potensi yang ada secara optimal sehingga dapat meningkatkan PAD dan menjadi daerah yang lebih mandiri dalam membiayai

kegiatan pemerintahan, kemudian pemerintah daerah dapat memanfaatkan PAD sebaik mungkin dalam mendukung pertumbuhan ekonomi serta mengentaskan kemiskinan. Dalam mengentaskan kemiskinan, pemerintah daerah harus juga memperhatikan alokasi belanja daerah untuk kepentingan publik, sehingga akan mengurangi kemiskinan.

2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain yang belum ada dalam penelitian ini sehingga mampu menjelaskan permasalahan kemiskinan lebih baik lagi. Peneliti juga sebaiknya memperbarui tahun penelitian agar menghasilkan penelitian yang sesuai dengan kondisi terbaru serta memperluas lokasi penelitian tidak hanya pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Dengan begitu diharapkan dapat melengkapi hasil penelitian yang telah ada dan hasilnya dapat dipergunakan sebagai bahan masukan serta pertimbangan oleh pihak yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi.